

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Pengadilan Agama Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bengkayang, 31 Desember 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

**HENDRA TIRTANA**  
NIP. 198208022008051001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	13
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	24
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	31
VI. Lampiran dan Daftar	





## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bengkayang, 31 Desember 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

**HENDRA TIRTANA**  
NIP. 198208022008051001



## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.232.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.232.000 atau mencapai 93,49 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp16.293.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp109.000.000 atau mencapai 100,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp109.000.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.232.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp109.733.955 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-94.501.955, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-94.501.955.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-94.501.955 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 94.501.955 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	16.293.000	15.232.000	93,49	16.781.500
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>16.293.000</b>	<b>15.232.000</b>	<b>93,49</b>	<b>16.781.500</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	109.000.000	109.000.000	100	109.000.000
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>100</b>	<b>109.000.000</b>

Bengkayang, 31 Desember 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

**HENDRA TIRTANA**  
NIP. 198208022008051001

**LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	15.232.000	16.781.500
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>15.232.000</b>	<b>16.781.500</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	2.008.955	6.079.647
Beban Barang dan Jasa	D.5	47.500.000	40.000.000
Beban Pemeliharaan	D.6	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	60.225.000	67.725.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>109.733.955</b>	<b>113.804.647</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(94.501.955)</b>	<b>(97.023.147)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(94.501.955)</b>	<b>(97.023.147)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(94.501.955)</b>	<b>(97.023.147)</b>

Bengkayang, 31 Desember 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

**HENDRA TIRTANA**  
NIP. 198208022008051001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	-	<b>3.886.647</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(94.501.955)</b>	<b>(97.023.147)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	94.501.955	93.136.500
<b>KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		-	(3.886.647)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	-	-

Bengkayang, 31 Desember 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

**HENDRA TIRTANA**  
NIP. 198208022008051001

NERACA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jkg Panjang	C.20	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		-	-
<b>PROPERTI INVESTASI</b>			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	-	-
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	-
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.53	-	-
<b>JUMLAH EKUTAS</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	-

Bengkayang, 31 Desember 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

**HENDRA TIRTANA**  
NIP. 198208022008051001



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Pengadilan Agama Bengkayang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lewoleba. Dasar pembentukan Pengadilan Agama tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dikarenakan terdapat kekeliruan perumusan dalam penetapan daerah hukum Pengadilan Agama Tarutung.

Pengadilan Agama Bengkayang diresmikan pada tanggal 8 September 2001 dan operasionalnya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2001. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang saat itu hanya mencakup wilayah Kabupaten Bengkayang saja yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sambas. Tak lama berselang tepatnya sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang mencakup 2 (dua) wilayah Kota/Kab. Adapun wilayah yurisdiksi adalah Kota Singkawang dengan luas wilayah lebih kurang 504 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah lebih kurang 5.383 km<sup>2</sup>, dan berkedudukan di Kota Singkawang

Pada Tahun 2016 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, terbentuk lah Pengadilan Agama Singkawang, yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada 22 Oktober 2018, maka sejak tanggal tersebut wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang menjadi 5.383 km<sup>2</sup> dan Pengadilan Agama Bengkayang sekarang berkedudukan di Kabupaten Bengkayang.

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraannya bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

*Visi dan Misi*

**VISI :**

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG YANG AGUNG”

**MISI :**

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

**MOTTO**

PRIMA : Profesional, Religius, Integritas, Mandiri, Akuntabel.



*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan*

## A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

*Basis Akuntansi*

## A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

## A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

## A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bengkulu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

### (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo



Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Beban**

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Aset**

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
<b>Lancar</b>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang

*Aset Tetap*

pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
  
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	16.293.000	16.293.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>16.293.000</b>	<b>16.293.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Barang	109.000.000	109.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp15.232.000

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.232.000 atau mencapai 93,49 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp16.293.000. Pendapatan Pengadilan Agama Bengkulu terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.232.000. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	16.293.000	15.232.000	93,49
<b>Jumlah</b>	<b>16.293.000</b>	<b>15.232.000</b>	<b>93,49</b>

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 9,23 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.232.000	16.781.500	(9,23)
<b>Jumlah</b>	<b>15.232.000</b>	<b>16.781.500</b>	<b>(9,23)</b>

Realisasi  
Penerimaan Pajak  
Rp0

### B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2023 sebesar 0,00 dari TA 2022 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pengembalian Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pendapatan Pajak/Bea Cukai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Realisasi  
Penerimaan  
Negara Bukan  
Pajak

### B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.232.000 dan Rp16.781.500. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 9,23 dari TA 2022 pendapatan ongkos perkara dan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya menurun dikarenakan penerimaan perkara mengalami penurunan pada tahun 2023. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	15.232.000	16.781.500	(9,23)
<b>Jumlah</b>	<b>15.232.000</b>	<b>16.781.500</b>	<b>(9,23)</b>

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Uang Meja (Leges)	420.000	400.000	5,00
Pendapatan Ongkos Perkara	5.760.000	6.000.000	(4,00)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.052.000	10.381.500	(12,81)
<b>Jumlah</b>	<b>15.232.000</b>	<b>16.781.500</b>	<b>(9,23)</b>

Realisasi Belanja  
Rp109.000.000

### B.2 Belanja

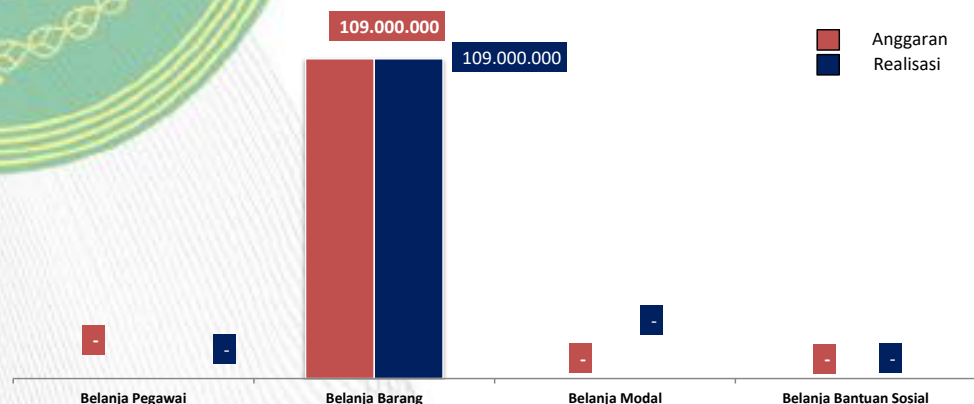
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp109.000.000 atau 100,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.109.000.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	109.000.000	109.000.000	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>100,00</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 sebesar 0,00% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang	109.000.000	109.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>-</b>

Realisasi Belanja  
Pegawai Rp0

**B.2.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar 0,00 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada Belanja Pegawai pada DIPA ini

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Barang  
Rp109.000.000

**B.2.2 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp109.000.000 dan Rp109.000.000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar 0,00% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak ada perubahan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Non Operasional	7.500.000	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.275.000	1.275.000	-
Belanja Jasa	40.000.000	40.000.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	60.225.000	67.725.000	(11,07)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	-

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2023	%
		-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Modal Rp0

**B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh karena tidak ada Belanja Modal pada DIPA ini.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

**B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran**



Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp0

**C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0

**C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar  
Dimuka (prepaid)  
Rp0

**C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja  
(prepayment) Rp0

**C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)**

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

*Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima Rp0

#### C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang  
Perpajakan Rp0

#### C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Piutang  
Perpajakan Rp0

#### C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Pajak</b>			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Piutang Bukan  
Pajak Rp0

#### C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Piutang Bukan  
Pajak Rp0

#### C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Bagian Lancar  
Tagihan Penjualan  
Angsuran Rp0

**C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Bagian Lancar  
Tagihan Penjualan  
Angsuran Rp0

**C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/T  
untutan Ganti Rugi

**C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/T  
untutan Ganti Rugi  
Rp0

**C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Persediaan Rp0

**C.15 Persediaan**

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Persediaan tersebut di atas dalam

**Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19**

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2023. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
	<b>Jumlah</b>	-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

**C.16 Persediaan yang Belum Diregister**

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

**C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Debitur	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

**C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran**

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:



Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Debitur	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

**C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya**

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

**C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Properti Investasi Rp0

**C.21 Properti Investasi**

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp0

**C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp0

**C.23 Tanah**

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah :</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2023*

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum  
Diregister Rp0

**C.24 Tanah Belum Diregister**

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan  
Mesin Rp0

**C.25 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan  
Mesin Belum  
Diregister Rp0

**C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister**

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan  
Bangunan Rp0

**C.27 Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan  
Bangunan Belum  
Diregister Rp0

**C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister**

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp0

**C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-



Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

### C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

### C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

### C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

### C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

### C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa Rp0

### C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

**C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

*Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2023*

No	Uraian	Jumlah
-		-
	<b>Jumlah</b>	-

Aset Tak Berwujud Rp0

**C.38 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Bengkulu berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

**C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per</b>	-

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

**C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya*

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022
Dana Lainnya	-	-
<b>Total</b>	-	-

*Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :*

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

**C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri**

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri*

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

*Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :*



Aset Lain-lain Rp0

#### C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Aset Lainnya yang  
Belum Diregister

#### C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset

#### C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

Utang kepada  
Pihak Ketiga Rp0

#### C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

##### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum  
Ditagihkan Rp0

#### C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

##### Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum  
Disahkan Rp0

**C.47 Hibah Yang Belum Disahkan**

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
<b>Jumlah</b>	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :  
hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan  
Pembayaran  
Pendapatan Rp0

**C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan**

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan  
Diterima Dimuka  
Rp0

**C.49 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :  
berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari  
KPPN Rp0

**C.50 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
<b>Total</b>	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka  
Pendek Lainnya

**C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :



Kewajiban Konsesi  
Jasa Rp0

**C.52 Kewajiban Konsesi Jasa**

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi iasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp0

**C.53 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca**



Pendapatan  
Perpajakan Rp0

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Pendapatan  
Negara Bukan  
Pajak  
Rp15.232.000

### D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp15.232.000 dan Rp16.781.500. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 9,23. Hal tersebut disebabkan oleh semua sumber PNBPN didapat dari pendapatan Kejaksaan dan Peradilan. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	420.000	400.000,00	5,00
Pendapatan Ongkos Perkara	5.760.000	6.000.000,00	(4,00)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.052.000	10.381.500,00	(12,81)
<b>Jumlah</b>	<b>15.232.000,00</b>	<b>16.781.500,00</b>	<b>(9,23)</b>

Beban Pegawai  
Rp0

### D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Beban Persediaan  
Rp2.008.955

### D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.008.955 dan Rp6.079.647

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 66,96 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	2.008.955	6.079.647	(66,96)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>2.008.955,00</b>	<b>6.079.647</b>	<b>(66,96)</b>



Beban Barang dan  
Jasa Rp47.500.000

#### D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp47.500.000 dan Rp40.000.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Bahan	4.400.000	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.100.000	-	-
Beban Jasa Konsultansi	40.000.000	40.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>47.500.000</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>18,75</b>

Beban  
Pemeliharaan Rp0

#### D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp60.225.000

#### D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp60.225.000 dan Rp67.725.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 11,07 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	13.725.000	13.725.000	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.500.000	54.000.000	(13,89)
<b>Jumlah</b>	<b>60.225.000,00</b>	<b>67.725.000</b>	<b>(11,07)</b>

Beban Barang  
Untuk Diserahkan  
kepada  
Masyarakat Rp0

#### D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Bantuan Sosial Rp0

**D.9 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

**D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

**D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

**D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar**

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0

**D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-



Surplus (Defisit)  
dari Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp0

#### D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

#### D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

#### D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

0

#### D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Ekuitas Awal  
Rp0,00

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.3.886.647,00

Defisit LO  
Rp.94.501.955,00

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.94.501.955,00 dan Rp.97.023.147,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan  
Akuntansi/  
Kesalahan  
Mendasar Rp.0,00

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai  
Aset Rp.0,00

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0,00

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Rp0,00

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Selisih Revaluasi  
Aset Rp.0,00

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi terhadap

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2023*

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi Rp0

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini



Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-Lain  
Rp0

**E.4.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi Antar  
Entitas

**E.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.94.501.955 dan Rp.93.136.500. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	109.000.000
Diterima dari Entitas Lain	(15.232.000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	733.955
<b>Jumlah</b>	<b>94.501.955</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 109.000.000, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 15.232.000

**E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp733.955 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2023

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp0

#### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.





## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bengkulu Triwulan III Tahun 2023 tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan BPK pada Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2023

#### F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2023 per 31 Desember 2023

#### F.2.3 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bengkulu adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor Virtual Account 653196320401000 atas nama BPG 093 Pengadilan Agama Bengkulu dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah)

#### F.2.4 Revisi DIPA

Terdapat 4 kali Revisi DIPA-005.04.2.632040/2023 tanggal 30-11-2022 pada Laporan per 31 Desember 2023

1. Revisi ke-1 tanggal 16 Februari 2023
2. Revisi ke-2 tanggal 18 April 2023
3. Revisi ke-3 tanggal 17 Juli 2023
3. Revisi ke-4 tanggal 4 Oktober 2023

#### F.2.5 Ralat SPP, SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPP, SPM, SSBP, dan SSPB pada Laporan per 31 Desember 2023

#### F.2.7 Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W14-A8/105/KP.04.6/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan W14-A8/104/KP.04.6/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan

1. Bendahara Pengeluaran : Suci Lestari, A.Md.Lib, BNT.
2. Bendahara Penerimaan : Aruni Zharfanisa Yudoko, S.H., BNT.

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W14-A8/912/KP.04.6/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Tim Pengelola Keuangan dengan susunan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Hendra Tirtana
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dodi Somawijaya
3. PPSPM : Wahyu Indradinata : Wahyu Indradinata
4. Bendahara Pengeluaran : Suci Lestari
5. Bendahara Penerimaan : Aruni Zharfanisa Yudoko
6. PPAPB : Muhammad Nur
7. Staf Pengelola Keuangan : Taufik Hidayat